

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

A. Nur Chofifah

NPP. 29.1348

*Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: andinurchofifah18@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of waste management and the opportunities for collaborative governance in waste management in Bone Regency, South Sulawesi Province. **Purpose:** The purpose of this study was to determine collaborative governance in waste management in Bone Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This research is a qualitative research with data collection in the form of interviews, observations and documentation to a number of predetermined informants, with analytical techniques in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results:** The findings obtained by the authors in this study that collaborative waste management in Bone Regency has been running with the formation of Non-Governmental Organizations by involving other stakeholders in its management, although there are still shortcomings, namely only playing a role in transporting waste. **Conclusion:** Collaborative waste management in Bone Regency, especially in Tanete Riattang District, has been running but not yet optimal the Environment Service, Camat, KSM, Garbage Bank, Garbage Collectors and the general public with awareness building at an early stage, making memorandums of understanding, establishing forums and clear road maps. The role of the sub-district head and the head of the service as the driving force is also shown, but it is recommended to optimize the existence of KSM by using it in tasks other than waste transportation.

**Keywords:** Collaboration, Waste Management, Institutional, Stakeholder, Leadership

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan pengelolaan sampah dan adanya peluang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi kepada sejumlah informan yang telah ditetapkan, dengan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini pengelolaan sampah secara kolaborasi di Kabupaten Bone telah berjalan dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan melibatkan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaannya walaupun masih terdapat kekurangan yaitu hanya berperan dalam pengangkutan sampah. **Kesimpulan:** Pengelolaan sampah secara kolaborasi di Kabupaten Bone Khususnya Kecamatan Tanete Riattang telah berjalan namun belum optimal antara Dinas Lingkungan Hidup, Camat, KSM, Bank Sampah, Pengepul Sampah dan Masyarakat umum dengan pembangunan kesadaran pada tahap awal, membuat nota kesepahaman, pembentukan forum dan road map yang jelas peran camat dan kepala dinas sebagai motor penggerak juga ditampilkan namun disarankan untuk mengoptimalkan keberadaan KSM dengan pemanfaatan di tugas lain selain pengangkutan sampah.

**Kata kunci:** Kolaborasi, Pengelolaan Sampah, Kelembagaan, Pemangku Kepentingan, Kepemimpinan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah adalah masalah sosial di Indonesia berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 memperlihatkan keseluruhan produksi sampah domestik telah mencapai 67,8 juta ton. Data tersebut menyiratkan bahwa setiap harinya dengan jumlah penduduk 270 juta dihasilkan sampah sebesar 185,753 ton atau setiap penduduk menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan sampah telah dibagi atas urusan konkuren yaitu pembagian pengembangan system dan pengelolaan sampah dibagi atas kepentingan nasional, regional dan kab/kota.

Pemerintah Kabupaten Bone memiliki kepedulian dengan lingkungan hidup yang dituangkan dalam visi Kabupaten Bone. Pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pengelolaan sampah yang di Pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bone masih jauh dari harapan yang diinginkan. Pemerintah hanya mampu mengelola sampah dengan baik di 3 (tiga)

kecamatan di pusat kota, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan TR Barat dan Timur. Pemerintah Kabupaten Bone belum mampu mengelola sampah di 24 kecamatan lainnya.

Penduduk bertambah seiring waktu dan produksi sampah yang dihasilkan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Timbulan sampah yang ditimbun di tempat pembuangan akhir tentu saja seiring berjalannya waktu akan *overload*. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone karena dalam pengelolaannya TPA Passippo menggunakan sistem semi *open dumping*. Penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan luas 126.35 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 145.394 jiwa dibandingkan jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 267 orang tentu ini tidak sebanding. Data pegawai tersebut menyiratkan bahwa satu orang petugas kebersihan melayani 396 jiwa penduduk. Berkaitan dengan keberadaan sampah di Kabupaten Bone. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus ditangani oleh banyak pihak untuk itu perlu kolaborasi dalam penyelesaiannya (Media Indonesia:2021).

Konsep pengelolaan sampah berbasis kolaborasi didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang membuka kesempatan seluas-luasnya berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan berbasis kolaborasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Terdiri dari masyarakat, LSM, pihak swasta, dan pemerintah menjadi model ideal (Damhuri dan Padmi, 2010:25).

Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang memahami penuh konsep kolaborasi untuk pengelolaan sampah yang mulai diterapkan pada tahun ini dengan slogan 'KOMPAK S'KALI BERSAMA KSM'. Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Kelola sampah untuk kebersihan lingkungan, bersama Kelompok Swadaya Masyarakat'. Latar belakang kelembagaan pengelolaan sampah ini didorong oleh penanganan sampah yang belum optimal, keterbatasan pemerintah namun disisi lain terdapat potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat yang belum dimanfaatkan selama ini. Dampak pengelolaan sampah yang tidak optimal menyebabkan penurunan kualitas Kesehatan masyarakat, lingkungan, kenyamanan dan keindahan. Pengelolaan sampah yang buruk di pusat kota akan berdampak pada image Kabupaten Bone secara keseluruhan, apalagi Kecamatan Tanete Riattang adalah ibu kota yang mewakili wajah Kabupaten Bone.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone. Pertama tingginya volume sampah pada tahun 2021 Kabupaten Bone menghasilkan sampah sebesar 27.141,77 adapun dalam pengurangan sampah yang dilakukan sebesar 6956,59 dengan persentase 25%. Hal ini tentu saja menunjukkan jumlah sampah yang besar tidak sebanding dengan pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

Faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dari total penduduk 149.867 jiwa dengan luas wilayah 126,35 hektar Kabupaten Bone di wilayah kecamatan kota yaitu Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur dengan petugas kebersihan 333 orang tidak dapat melayani secara maksimal dengan kata lain 1 orang petugas kebersihan melayani 400 jiwa penduduk. Belum lagi sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup masih jauh dari kata cukup untuk melakukan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah.

Masyarakat juga belum mengerti mengenai pengelolaan sampah secara holistik yaitu masyarakat masih menerapkan program konvensional yaitu menggunakan cara timbun, angkut, buang yang harusnya pada masa dewasa ini pengelolaan sampah minimal menerapkan pengelolaan sampah *reuse*, *reduce* dan *recycle* dikarenakan dalam pengelolaan sampah yang masih menerapkan konsep konvensional akhirnya dapat membuat penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone seperti dilansir dari berita Tribun Bone dengan *headline* berita “Jorok, Sampah Menumpuk di Jl Sulawesi Bone Keluarkan Bau Busuk” dari berita tersebut dijelaskan bahwa di Jalan Sulawesi terdapat dua titik yang menjadi tempat masyarakat membuang sampah secara sembarangan padahal telah dipasang larangan membuang sampah di tempat tersebut, tumpukan sampah yang menumpuk mengakibatkan bau busuk keluar dari sampah tersebut. Berdasarkan hasil observasi di wilayah tersebut masih menjadi titik tempat pembuangan sampah secara liar.

Sikap masyarakat yang seperti demikian menunjukkan abainya masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan menitikberatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup. Padahal permasalahan sampah yang begitu kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya. Peran serta selain pemerintah dalam pengelolaan sampah tentu saja sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah ini.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks perencanaan kolaborasi, penanganan sampah secara kolaborasi maupun konteks permodelan sampah pemukiman berbasis manajemen kolaborasi. Penelitian Ely Sulfianti berjudul Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Ely Sulfianti, 2011), menemukan bahwa dalam pengelolaan sampah dibutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Keberhasilan perencanaan kolaborasi pada pengelolaan lingkungan. Penerapan konsep kolaborasi dalam pengelolaan sampah juga tidak mustahil diterapkan. Keterlibatan pemangku kepentingan diikat dalam proses kolaborasi dengan keberhasilan sangat ditentukan oleh partisipasi

aktif dan perencanaan dalam melihat karakteristik masyarakat dan permasalahan yang ada. Penelitian (Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu, 2019) yang berjudul Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat) menemukan bahwa proses tata kelola kolaborasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanganan sampah antara Masyarakat dengan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan adapun pendekatan penelitian yang dipakai dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh adalah telah terjadi proses kolaborasi. Kolaborasi terbentuk karena adanya kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama terhadap pengelolaan sampah serta didukung dengan terlihatnya keberhasilan yang telah dirasakan pemangku kepentingan. Kolaborasi terjalin dengan kendala yaitu masyarakat yang belum terbiasa dalam memilah sampah namun adanya dialog untuk mencari solusi dalam penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian Slamet Rosyadi dan Erna Lestianingrum dengan judul Permodelan Sampah Permukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi (Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kabupaten Cirebon) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah juga perlu dilakukannya manajemen kolaborasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan dari kolaborasi dipengaruhi oleh komitmen, kemauan berpartisipasi, sikap profesional dan keterbukaan dalam menjalankan kolaborasi. Hasil-hasil yang diperoleh dari dijalankannya kolaborasi di Desa Palimanan Barat yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat melalui BUMDES, meningkatnya kapasitas institusi lokal dan kontribusi pada perbaikan lingkungan. Persamaan penelitian yaitu menggunakan konsep kolaborasi dalam melihat penyelesaian permasalahan sampah (Rosyadi dan Lestianingrum 2013).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terdapat beberapa perbedaan serta persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan itu muncul dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai beragam fokus dan lokasi yang diteliti, berbeda dengan penelitian ini yang melihat kepada bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada inovasi mengenai kolaborasi pengelolaan sampah di Kecamatan Tanete Riattang dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat. Selanjutnya teori-teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash (2007) yang terdiri dari 5 dimensi untuk melihat *collaborative governance* yang terjadi yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *process collaboration* (proses kolaborasi).

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif 7 agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (interview), observasi (observation), dan dokumentasi (taking notes). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan teori *collaborative governance* oleh Ansel dan Gash (2007) yang memiliki 4 (empat) dimensi yaitu *starting condition* (kondisi awal), *institusional design* (desain institusional), *facilitative leadership* (kepemimpinan fasilitatif) dan *process collaboration* (proses kolaborasi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut:

### **3.1. Starting Condition (Kondisi Awal)**

Kondisi awal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone memiliki banyak kendala dan tantangan dimulai dari sumberdaya baik sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone jumlah pegawai dinas lingkungan hidup sebanyak 333 orang dari total tersebut hanya 29 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang melakukan tugas di bidang pengelolaan sampah sisanya hanya sebagai honorer dengan jumlah tenaga kebersihan sebanyak tersebut, sangat jauh dari kata memadai. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup jauh dari kata cukup untuk melayani pengelolaan sampah untuk pengangkutan dari rumah ke rumah. Hal ini diperparah dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih memakai paradigma lama yaitu kumpul-angkut-buang. Oleh karena itu pengelolaan sampah secara kolaborasi harus didorong untuk meningkatkan penanganan sampah di Kabupaten Bone. Kolaborasi ini juga muncul dikarenakan pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan sampah secara sendiri. Pemotongan anggaran satgas kebersihan di karenakan

refocusing anggaran akibat covid-19 menjadi salah satu dorongan harus adanya kolaborasi serta keinginan masyarakat yang menginginkan lingkungan bersih bebas dari sampah dan sehat.

### **3.2. *Institusional Design (Desain Institusional)***

Institusional atau kelembagaan adalah unsur-unsur yang secara terorganisasi saling berkaitan dalam hal ini meliputi baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Bone sendiri dibentuk forum yaitu KOMPAK S'KALI BERSAMA KSM (Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Kelola Sampah untuk Kebersihan Lingkungan Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat) khususnya Kecamatan Tanete Riattang yang telah dibentuk di 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Biru, Masumpu dan Bukaka, pada desain institusional diharapkan partisipasi forum dari setiap komponen dengan adanya keterlibatan dalam penyusunan, pembentukan, dan kepengurusan KSM ini baik dari tokoh masyarakat, stakeholder internal kecamatan, dan stakeholder eksternal. Dan pembentukan Bank sampah yang berperan dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat. Keberadaan forum ini telah diatur berdasarkan regulasi yang telah dibuat yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Nomor 14/2019 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Mabessa. Lain halnya dengan aturan dasar yang mengikat penyelenggaraan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang yang pembentukan tim kerjanya berdasarkan Surat Keputusan Camat Tanete Riattang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Kelola Sampah untuk Kebersihan Lingkungan Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat serta dengan pembuatan AD-ART lembaga. Transparansi forum juga dijunjung tinggi dengan keterbukaan pengelolaan dan pembuatan pengaduan pelayanan secara online yaitu dapat diakses melalui FLapor Plis (Layanan Pengaduan Online Rakyat Peduli Lingkungan Sekitar). Pengaduan *online* ini berguna untuk mengakomodir keluhan - keluhan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan hidup.

### **3.3. *Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)***

Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Camat Tanete Riattang menunjukkan pemahamannya secara penuh mengenai pengelolaan sampah secara kolaborasi hal ini ditunjukkan dengan program-program yang dibuat dengan menunjukkan dan melibatkan pemangku kepentingan lain. Berperan sebagai motor penggerak yang memahami substansi pengelolaan sampah, memberi contoh dengan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat salah satunya dengan kegiatan Jumpa Berlian (Jumar Pagi Bersih Lingkungan) dengan mengajak jajaran FORKOPIMDA dan

masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan kepemimpinan fasilitatif dengan pemangku kepentingan lainnya juga berusaha membangun hubungan kekeluargaan antara pemerintah dan pemerintah serta pemerintah dengan masyarakat. Menerapkan falsafah bugis yaitu Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge yaitu saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan. Kepemimpinan fasilitatif yang baik adalah kepemimpinan yang terbuka untuk menerima kritikan dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki rasa kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat. Pemimpin yang menghormati dan menghargai pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung jalannya proses kolaborasi dan pemerintahan.

### **3.4. Process Collaboration (Proses Kolaborasi)**

#### **a. Dialog Tatap Muka**

Dialog tatap muka yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dengan pemangku kepentingan lain dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dilansir dari beritabersatu.com dengan *headline* Pemkab Bone Sosialisasikan Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau pada Titik Pantau Adipura. Berdasarkan berita tersebut dilakukan sosialisasi kepada camat, lurah, kepala sekolah, unit-unit bank sampah dan beberapa organisasi perangkat daerah. Adapun pemerintah Kecamatan Tanete Riattang berupa rapat dan koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan lain. Jika dialog tatap muka ataupun berkomunikasi hal ini membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Dialog tatap muka membuat para aktor saling berbagi pemahaman kekurangan ataupun keterbatasan setiap pemangku kepentingan.

#### **b. Membangun Kepercayaan**

Dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dalam membangun kepercayaan melalui saling menghormati peran dan kewenangan setiap pemangku kepentingan. Transparansi dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor pendukung terutama dalam hal retribusi yang berkaitan dengan uang. Kepercayaan dari pengelola KSM juga sebagai mitra dalam pengelolaan sampah juga harus dibangun.

#### **c. Komitmen Terhadap proses**

Komitmen terhadap proses diwujudkan dengan adanya AD-ART kelompok swadaya masyarakat. Berdasarkan Anggaran Dasar-Rumah Tangga menjadi komitmen setiap pengurus dan anggota bahwa memanfaatkan dan memelihara sarana penyehatan lingkungan,

khususnya sarana kebersihan lingkungan, belajar bersama dan mengembangkan sikap hidup yang sehat. Serta setiap rumah tangga pengguna/pemanfaat sarana dikenakan iuran wajib sebesar Rp. 15.000 setiap bulan. Iuran setiap bulan ditagih selambat-lambatnya pada tanggal 10. Pengangkutan sampah dilakukan 3 kali seminggu Senin, Rabu dan Jumat. Berdasarkan komitmen yang ada bahwa dapat dilihat bahwa komitmen tersebut masih abu-abu oleh karena itu perlu lagi pembahasan antara pengurus KSM dengan pihak pemerintah baik dari kelurahan, kecamatan dan dinas lingkungan hidup.

**d. Pemahaman Bersama**

Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama apa yang mereka dapat capai bersama. Tujuan pembentukan KSM. Tujuan Jangka Pendek: terbentuknya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada tiga kelurahan Kecamatan Tanete Riattang. Telah terbentuknya KSM di ketiga kelurahan yaitu KSM. Tujuan Jangka Menengah: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada delapan kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang. Tujuan Jangka Panjang: Terwujudnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Kecamatan Tanete Riattang.

**e. Hasil Sementara**

Hasil sementara adalah tujuan jangka pendek yang ingin diraih, dalam hal pengelolaan sampah menjadi keinginan semua pihak untuk memiliki wilayah yang bersih dan bebas dari sampah. Tujuan Jangka Pendek: terbentuknya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sampah melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada tiga kelurahan Kecamatan Tanete Riattang yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Masumpu Sejahtera, Kelompok Swadaya Masyarakat Mulia Sejahtera dan Kelompok Swadaya Masyarakat Biru. Untuk pengolahan sampah masih dilakukan pada tahap pengangkutan namun yang masih terkendala sarana dan prasarana yang bukan milik KSM dan luas wilayah dan beban kerja yang begitu besar. Tujuan Jangka Menengah: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pada delapan kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang. Hal ini masih belum terwujud dikarenakan masih 3 kelurahan yang diangkut sampahnya namun dalam penanganan sampah masih menggunakan paradigma lama kumpul-angkut-buang, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat masih belum sadar mengenai pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah dari rumah tangga

masih rendah. Tujuan Jangka Panjang: Terwujudnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sampah oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Kecamatan Tanete Riattang. Masyarakat belum secara penuh sadar bahwa sampah itu memiliki nilai ekonomis jika dikelola dan didaur ulang saat ini yang masih menjadi contoh dalam pemanfaatan sampah untuk bernilai ekonomis adalah bank sampah dan TPS 3R. Kedepannya KSM akan berusaha dikelola agar setiap KSM yang ada dapat membantu ekonomi anggotanya.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

*Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan namun belum optimal dengan pembentukan forum berupa Kelompok Swadaya Masyarakat dan Bank Sampah merupakan salah satu pemecahan masalah dalam menghadapi permasalahan sampah di Kabupaten Bone dengan menerapkan konsep kolaborasi. Penulis menemukan temuan penting yakni pengelolaan sampah secara kolaborasi menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadapi masalah yang dihadapi dapat kita lihat pada pembentukan (Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Kelola Sampah untuk Kebersihan Lingkungan Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat) yang melibatkan Pemerintah Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat umum dan pemangku kepentingan lain. Sama halnya dengan temuan Sufiyanti bahwa Pengelolaan sampah berbasis kolaborasi akan menggerakkan seluruh stakeholder untuk bertanggungjawab secara kolektif dengan tujuan menangani permasalahan sampah (Sulfiyanti, 2011). Keberhasilan pengelolaan sampah secara kolaborasi tidak terlepas dari seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam kolaborasi ini, peran kepemimpinan fasilitatif sebagai motor penggerak serta adanya komitmen, keterbukaan dan dialog tatap muka menjadi kunci keberhasilan sama halnya dengan temuan Rosyadi dan Lestianingrum bahwa keberhasilan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi sangat ditentukan oleh komitmen, partisipasi aktif semua aktor, profesionalisme dan transparansi (Rosyadi dan Lestianingrum, 2013). Namun pengelolaan sampah ini tentu saja tidak terlepas dari kekurangan yaitu masih banyaknya masyarakat yang acuh mengenai pengelolaan sampah secara holistic yaitu *reuse*, *reduce* dan *recycle* bahkan masih ada yang membuang sampah secara sembarangan, hal ini dapat diatasi dengan pertemuan tatap muka yang dilakukan secara intens dan berkelanjutan layaknya temuan penelitian yang dilakukan oleh Edwin Rinaldo dan Amy Yayuk Sri Rahayu yaitu kolaborasi terbentuk karena adanya kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama terhadap pengelolaan sampah, kolaborasi terjalin dengan kendala yaitu masyarakat yang belum terbiasa dalam memilah sampah namun dengan adanya dialog tatap muka mempertemukan pemangku kepentingan dengan duduk bersama membahas bersama mencari solusi dalam penyelesaiannya.

#### 4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor pendukung terlaksananya kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dapat terjadi dikarenakan peran besar kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini Camat Tanete Riattang inisiatif, ide dan gagasan, serta mau terjun langsung kemasyarakat yang menjadi kunci terwujudnya kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Kedepannya diharapkan kecamatan lain di Kabupaten Bone dapat menerapkan pengelolaan sampah secara kolaborasi ini.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sudah terjalin namun belum optimal. pembangunan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sebagai awal tahap kolaborasi, dengan membuat nota kesepahaman dengan stakeholders. Tahap kedua dengan membangun kelembagaan pengelolaan sampah dengan slogan “Kompak S’kali bersama”. Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai pengelola sampah. Konsisten menjalankan program dengan melakukan berbagai kegiatan lomba kebersihan. Melakukan road map yang jelas dengan tahapan-tahapan target yang harus dicapai, jangka pendek, menengah dan panjang. Camat sebagai pimpinan daerah, melakukan peran sebagai motor penggerak yang memahami substansi pengelolaan sampah. namun terdapat kendala berupa partisipasi dari pihak swasta yang belum terdapat partisipasi serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan mengenai pengelolaan sampah, komitmen dalam pengelolaan sampah masih abu-abu mengenai pembagian wilayah dan percepatan penanganan sampah dari rumah ke TPS dan Peran Kelompok Swadaya Masyarakat yang hanya berperan dalam pengangkutan sampah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya berfokus pada Kecamatan Tanete Riattang dikarenakan memiliki kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Tanete Riattang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Islamiy, L.O.S. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Josep. 2018. *Perbandingan Tata Pemerintahan Antara Good Governance dan Sound Governance*. Jakarta Selatan: Indocamp.
- Mindarti, L. I. 2018. *Konsep Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, L.W. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, Seventh Edition*. United States of America: Pearson Education Company.
- Nugroho, Panji. 2013. *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka Baru Press Hikmat.
- Riduan, Akhmad. 2021. *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. Sleman: Bintang Pustaka Madani.
- Rinrin, Migristine. 2020. *Pengolahan Sampah Plastik*. Bandung: Titian Ilmu.
- Ruane & Janet. 2005. *Essentials of Research Methods*, Blackwell publishing
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 152 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

### **Jurnal**

Ansell, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18(4): 543-571.

Bachtiar, H., Imam, H., & Mochamad, R. 2015. *Pengembangan Bank Sampah sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Koperasi Bank Sampah Malang)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3(1): 128-133.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.22(1): 1-13.

Kumar, Ranjit. 2011. *Research Methodology*, SAGE

Morse, R. S., & Stephens, J. B. 2012. *Teaching collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-based Learning*. *Journal of Public Affairs Education*, Vol.18(3): 565-583.

Pratikno. 2005. *Good Governance dan Governability*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8(3): 231-248.

Raharja, S. U. J. 2008. *Model kolaborasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai Citarum*. Disertasi, FISIP Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: UI.

Rinaldoa, E., Rahayu, S. Y. 2019. *Penanganan Sampah Secara Kolaboratif antara Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan (Kasus Penanganan Sampah di Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat*. *Jurnal Inspirasi*, Vol.10(1): 133-137.

Rosyadi, S., & Lestianingrum, E. 2013. *Permodelan Sampah Pemukiman Berbasis Manajemen Kolaborasi*. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Vol.13(2): 111-123.

Sulfianti, E. 2011. *Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.8(3): 322-329.

### **Lainnya**

Damanhuri, E., & Padi, T. 2010. *Pengelolaan sampah*. Diklat kuliah TL, 3104: 5-10.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2018-2023

Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023

Laporan Hasil Implementasi Aksi Perubahan KOMPAK S'KALI BERSAMA KSM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Tahun 2021

<https://makassar.tribunnews.com/2021/04/14/jorok-sampah-menumpuk-di-jl-sulawesi-bone-keluarkan-bau-busuk>.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/408569/perlu-kolaborasi-skala-besar-atasi-masalah-sampah>.

